

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pembangunan desa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional yang telah dirancang hingga lima tahun mendatang. Hal ini merupakan salah satu bentuk Program Nawacita Pemerintah yaitu : “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka NKRI”. Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN pada Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi desa yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dengan adanya pengalokasian Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan desa, pemerataan kesejahteraan desa dan memajukan perekonomian desa.

Sebagai bentuk pemerintahan terendah, desa diberikan otonomi yang dimana didalam otonomi desa, desa memiliki hak untuk mengelola atau mengatur urusan rumah tangganya sendiri termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa kepala desa memiliki wewenang dalam menyelenggarakan seluruh keuangan

desa. Untuk dapat melaksanakan otonomi desa dengan sebaik-baiknya maka diperlukan faktor-faktor yang dapat mendukung seperti Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana, keuangan, serta sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan otonomi desa, maka desa juga dituntut untuk dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan berupa pembuatan kebijakan, perencanaan maupun pelayanan kepada masyarakat secara baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sejak adanya UU NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan-peraturan pendukungnya memacu agar dalam pengelolaan keuangan desa bisa dibuat dengan memegang asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta melakukan pelaksanaan akuntansi desa secara tertib dan disiplin anggaran.

Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), menyatakan bahwa saat ini maraknya terjadi kasus korupsi yang dimana pada setiap tahun jumlahnya dapat selalu bertambah bahkan menjadi dua kali lipat dari tahun ke tahun. Pada 2015, kasus korupsi berjumlah 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada 2016. Tahun 2017 melonjak menjadi 96 kasus. Total kasus pada 2015- 2017 mencapai 154 kasus. Hal ini terjadi karna kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa secara baik, dan minimnya pelibatan dan pemahaman warga akan proses pembangunan desa ([antikorusi.org](http://antikorusi.org)). Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung

jawab sebagai pelaksana dan juga perumus suatu kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Agar dapat memberikan informasi yang detil dan juga memeberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat dan juga dapat di pertanggung jawab terkait penggunaan anggaran, baik itu berupa pelaksanaan pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisik. Hal ini dilakukan agar terciptanya pemerintahan yang bersih, adil, akuntabel, partisipatif dan trasnfaran.

Untuk dapat terciptanya pengelolaan anggraran yang baik tentunya harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, namun nyatanya sumber daya manusia yang ada di desa pada saat ini dirasakan masih kurang terlebih lagi dalam memahami pedoman penyusunan pengelolaan anggaran desa, hal ini dikarnakan kurangnya infrastruktur sarana dan prasarana yang ada di desa. Pada saat ini pemerिताah menerapkan penggunaan teknologi dan informasi (*e-government*) dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, menurut Menurut Emilsyah (2014) dalam (Gunawan, 2016) *E-government* adalah salah satu bentuk pelayanan publik yang terhubung dengan teknologi dan informasi sehingga dapat memudahkan dalam prosesnya.

Untuk menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis *E-government* Pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa dengan aplikssi yang bernama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dengan adanya Aplikasi Sistem Keuangan Desa

(Siskeudes) ini maka diharapkan dapat memudahkan dalam pelaporan keuangan, menata kelola keuangan desa secara optimal dan sebagai bentuk perbaikan untuk pemerintah untuk dapat mengelola laporan keuangan menjadi lebih baik dan efektif, efisien dan transparansi. Sampai saat ini, tingkat implementasi dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sudah mencapai 33,17% atau 24.863 dari 74.954 di seluruh desa yang ada di Indonesia, harapannya nanti pada tahun 2019 nanti bisa diterapkan di seluruh desa di Indonesia (Sulina, Wahyuni, & Kurniawan, 2017).

Pada tahun 2015 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memperkenalkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan nama SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Pada tahun 2016 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini mulai diterapkan pemerintah (Malahika, Karamoy, & Pusung, 2018). Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang menerapkan aplikasi sistem keuangan desa setiap kabupatennya, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 terkait aplikasi Sistem Keuangan Desa yang ditujukan kepada gubernur, bupati/walikota seluruh Indonesia. Surat edaran tersebut berisi himbauan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengkoordinasi dan memfasilitasi penerapan/pemampatan aplikasi sistem keuangan desa untuk pengelolaan keuangan desa. (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 143/8350/BPD Tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa)

Dengan adanya surat edaran tersebut maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, menghimbau kepada seluruh Kepala Desa untuk menerapkan aplikasi

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ke desa-desa yang ada di kabupaten Musi rawas utara. Salah satu desa yang telah menerapkan aplikasi Sistem keuangan desa ini adalah Desa Rantau Jaya, dengan penerapan aplikasi ini diharapkan pemerintah desa rantau jaya dapat membuat laporan keuangan secara efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabel guna terciptanya pemerintahan *good goverment*.

Menurut Kepala Desa Rantau Jaya (Hermanto) Desa Rantau Jaya sudah menerapkan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2016, dengan data-data yang di input ke dalam aplikasi Siskeudes yaitu meliputi: (1) Laporan Keuangan, (2) Perencanaan, (3) Penganggaran, (4) Penatausahaan (5) Pembukuan. Sebelum menggunakan aplikasi Siskeudes pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan menggunakan cara manual, cara manual ini dirasa masih kurang efisien dalam pembuatan laporan keuangan, namun sejak adanya aplikasi Siskeudes ini pemerintah merasa terbantu karna proses penggunaan aplikasi ini yang mudah dan lebih efisien dari pada menggunakan cara manual. Untuk menerapkan aplikasi Siskeudes ini pemerintah memerlukan perangkat keras komputer dan koneksi internet untuk mendukung jalannya aplikasi ini, namun pada saat ini desa Rantau hanya baru memiliki 1 perangkat komputer, 1 laptop dan 1 Printer, koneksi jaringan internet pun masih dikategorikan tergolong cukup susah dan pemahaman masyarakat di bidang teknologi dan informasi pun masih kurang.

Penerapan aplikasi Siskeudes yang ada di desa Rantau jaya bisa dikatakan masih kurang efektif, dikarenakan faktor seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang

ada di desa Rantau jaya dalam pengelolaan aplikasi Siskeudes ini masih dikatakan kurang mampu memahami aplikasi ini.

**Tabel 1. 1**

Data Pendidikan Perangkat Desa Rantau Jaya Tahun 2016

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Hermanto	Kepala Desa	SMA
2	Alamsyah	Sekretaris Desa	S1
3	Sunardi	Kadus 1	SMA
4	Leni	Kadus 2	SMA
5	Suharto	Kadus 3	SMA
6	Sucip	Kadus 4	SMA
7	Indah	Kadus 5	SMA
8	Sarif Efendi	Kadus 6	SMA
9	Haidir	Kepala Keuangan	SMA
10	Papin Lenardo	Kepala Tata Usaha dan Umum	S1
11	Edi Hariyanto	Kepala Perencanaan	SMA

*Sumber: Peraturan Desa Rantau Jaya No 03 Tahun 2016*

Sarana prasarana dan penguasaan dibidang teknolgi dan informasi di desa Rantau jaya masih kurang memadai, karna saat pemerintah desa Rantau jaya baru memiliki 1 unit Komputer, 1 unit Laptop dan 1 unit Printer.

**Tabel 1. 2**

Sarana Dan Prasarana Desa Rantau Jaya

No	Nama Alat	Jumlah
1	Komputer	1 Unit
2	Laptop	1 Unit
3	Printer	1 Unit

*Sumber: Wawancara Kepala Desa Rantau Jaya*

Sehingga dilihat dari pernyataan diatas penerapan aplikasi ini di desa Rantau jaya masih dirasa kurang efektif, dan jika dalam penerapannya saja sudah tidak efektif bagaimana pemerintah desa Rantau jaya dapat mengelola keuangan desa secara baik, sedangkan pemerintah di tuntut untuk dapat memberikan informasi secara terbuka atau transparansi terkait penggunaan anggaran desa. Maka dari itu penulis mengambil judul

“Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Guna Meningkatkan Transparansi di Desa Rantau Jaya, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 ”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rantau Jaya Tahun 2017 ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rantau Jaya Tahun 2017.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya kajian studi ilmu pemerintahan, khususnya terkait sistem informasi pemerintah desa dalam bidang keuangan desa dan menambah wawasan kepada masyarakat terkait pemanfaatan dari aplikasi SISKEUDES yang ada di pemerintah desa.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah desa untuk dapat mengelolah keuangan desa secara baik melalui Aplikasi SISKEUDES dan Masyarakat dapat mengetahui kegunaan dan manfaat dari Aplikasi SISKEUDES yang ada di Desa mereka masing-masing.

### 1.5. Tinjauan Pustaka

Adapun tinjauan pustakadari penelitian-penelitian sebelumnya, yang berkaitan langsung dengan latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu:

**Tabel 1.3**  
Tinjauan Pustaka

No	Judul	Peneliti	Isi	Jurnal
1	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Umami & Nurodin, 2017	Adanya pengaruh transparansi pemerintah terhadap pengelolaan keuangan desa, karna setiap akan adanya pencairan dana pemerintah selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait informasi penggunaan dana. Dan adanya pengaruh akuntabilitas, karena pemerintah desa telah memberikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar pelaporan keuangan, ini telah menunjukan bahwa pemerintah sebagai entitas pelaporan telah merealisasikan prinsip akuntabilitas.	Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Vol. 6 Edisi 11
2	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana Dan	Bs, Putu, Ayu, Rakhmawati, &	Sumber daya manusia yang ada di kabupaten lombok tengah telah mampu untuk menyelenggarakan laporan	Jurnal Conference on Management

	Prasarana Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Lombok Tengah	Atikah, 2016	keuangan yang sesuai dengan peraturan dan standar laporan keuangan, hal ini juga didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang ada sehingga mampu menunjang terlaksananya laporan keuangan dengan baik meskipun masih ada beberapa kekurangan.	and Behavioral Studies ISSN NO: 2541-3400
3	Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan	Sulina et al., 2017	Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di desa kaba-kaba sangat bermanfaat dan memudahkan pegawai dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini karnakan prosesnya mudah dalam penginputan sekali sudah sesuai dengan transaksi yang ada, dan output yang dihasilkan berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol:8 No:2
4	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang	Setyowati, Isthika, & Pratiwi, 2016	Peran teknologi dan informasi tidak begitu memberikan peran yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi justru Peran internal audit dan kompetensi sumber daya manusia yang memberikan peran yang signifikan dan positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah kota semarang.	Jurnal Kinerja Volume 20, No.2
5	Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap	Gunawan, 2016	Penerapan sistem e-budgeting pemerintah kota surabaya dilandasi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	Jurnal Akuntansi Vol.8 No.1

	Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya)		21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam penerapnya sistem e-budgeting di kota surabaya sudah bisa di terapkan di seluruh SKPD dan kelurahan, kecamatan dan juga dinas. Dalam penerapan sistem e-budgeting masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan awal pembuatan anggaran. Tujuan di terapkanya sistem e-budgeting ini untuk memudahkan tim anggaran berkomunikasi dengan pemeritah kota surabaya dalam membuat rancangan RKPD yang nantinya hasil dari RKPD akan di sampaikan kepada wali kota surabaya untuk pemebentukan APBD kota surabaya.	
6	Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang)	Siregar, 2017	Efektifitas dalam pengelolaan keuangan berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, semakin tinggi tingkat efektifitas yang telah di jalan semakin tinggi juga tingkat keberhasilan suatu organisasi tersebut, di desa yang ada di kabupaten Deli tingkat efektifitas terkait penyerapan anggran desa mencapai rasio 100%, sedangkan tingkat efisinsi masih dikatakan kurang efisinsi.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi  Vol.2 No.4
7	Analisis Pengelolaan Keuangan	Mamuaya, Sabijono,	Laporan keuangan desa yang ada di desa adow sudah sesuai dengan peraturan dan strandar	Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen,

	Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)	& Gamaliel, 2017	pelaporan keuangan, laporan keunagn desa ini dikelola oleh bendahara desa dengan menggukan aplikasi SISKUEDES, hanya saja dalam pelaporan keuangannya masih mengalami keterlambatan dikarnakan pelaporan pemerintah desa ke pemerintah pusat dan daerah dilakukan ketika sudah masuk ke kas desa dan seluruh kegiatan sudah terealiasasi.	Bisnis dan Akuntansi  Vol.5 No.2
8	Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa	Meylina, 2018	Regulasi keuangan desa yang ada di indonesia sudah cukup signifikan terkait dana desa, hal ini di tunjukan bahwa sudah banyak peraturan-peraturan yang terkait langsung dengan penggunaan dan pengawasan dana desa, sehingga dapat menghasilka laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasil laporan dapat di pertanggung jawabkan.	Jurnal Masalah - Masalah Hukum  Jilid 46 No. 1
9	Penerapan (Electronic Government) E-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang	Oktavya, 2015	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap penerapan e-government masih kurang, hal ini dikarnakan sikap masyarakat masih apatis terhadap perkembangan teknologi hal ini juga dikarnakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah dalam memperkenalkan e-government kepada masyarakat. Penempatan sumber daya manusia	Jurnal Ilmu Pemerintahan  Vol.3 No.3

			khususnya pada kantor pelayanan pajak (KPP) tidak sesuai dengan jurusan pendidikan yang mereka miliki sehingga masih memiliki ketimpangan terhadap pelayanan yang diberikan.	
10	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Dwi, Dewanti, & Kurrohm an, 2016	Perencanaan pengelolaan keuangan yang ada di desa Berong terdapat ketidak sasuaian dengan Permendagri No. 37 tahun 2007, selain itu juga terdapat ketidak sesuaian perencanaan keuangan yang ada di desa Berong dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 yang terlihat dari penetapan RKPDesanya, penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesanya dan juga untuk evaluasinya.	Artikel Ilmiah Mahasiswa 2016 Vol.4 No.3

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, dimana penelitian sebelumnya membahas terkait Kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan dalam penelitian ini membahas terikat Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. Adapaun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, dimana dalam penelitian ini sama-sama membahas terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

## 1.6. Kerangka Teori

### 1. Efektivitas

#### Pengertian Efektivitas

Berdasarkan Ensiklopedi Umum Administrasi (1979) dalam (Zainudin, 2014). Bahwa efektivitas berasal dari kata kerja efektif, yang berarti timbulnya suatu akibat atau efek yang diinginkan setelah melakukan sesuatu perbuatan. Menurut (Jaya, 2014) efektivitas adalah alat untuk mengukur sejauh mana target kualitas, kuantitas, dan waktu, berdasarkan target yang telah ditentukan sebelumnya, yang dimana semakin tinggi tingkat persentase yang dicapai berarti semakin tinggi juga tingkat efektivitasnya.

Menurut Effendy (2003) dalam (Khadafi & Mutiarin, 2014), efektivitas adalah proses komunikasi untuk mencapai suatu tujuan berdasarkan biaya yang sudah dianggarkan, waktu dan juga personil yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut (Zainudin, 2014) bahwa efektivitas dapat didefinisikan menjadi 4 hal sebagai berikut:

- 1) Mengerjakan sesuatu dengan benar yang sesuai dengan peraturan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Mampu mencapai tingkat di atas pesaing, yang dimana dapat menjadi yang terbaik diantara yang terbaik.
- 3) Menghasilkan sesuatu yang bermanfaat berdasarkan sesuatu yang telah dikerjakan.
- 4) Mampu menghadapi tantang di masa depan.

Sedangkan menurut (Mahmudi, 2005), efektivitas adalah bentuk hubungan antara output dengan tujuan dengan, yang dimana semakin tinggi kontribusi dari output maka semakin besar pencapaian tujuan tersebut. Menurut Drucker dalam (Zainudin, 2014) mengatakan bahwa efektivitas merupakan bentuk kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang benar, sedangkan efisiensi melakukan sesuatu kegiatan yang benar. Jadi efektivitas merupakan tingkat ukuran sejauh mana kita melakukan sesuatu dengan benar, sedangkan efisien berupa bagaimana cara kita melakukan atau cara kita dapat mengelola sumber daya yang ada menjadi sesuatu yang benar.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan bentuk pencapaian sesuatu kegiatan yang dimana dalam kegiatan itu dapat menghasilkan sesuatu yang berguna dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Efektivitas juga merupakan pencapaian suatu kegiatan dengan tepat dan benar yang sesuai dengan ketentuan dan juga berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam (Zainudin, 2014), ada faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas yaitu:

- 1) Faktor Kondisi Lingkungan, kondisi lingkungan ini dapat mempengaruhi tingkat efektivitas, faktor kondisi lingkungan ini dapat dilihat dari kondisi suatu lingkungan kerja suatu program, apabila kondisi lingkungan kerja baik maka akan dapat menghasilkan sesuatu yang baik juga (efektif), tapi jika

kondisi lingkungan buruk maka akan dapat menghasilkan kerja yang buruk juga (tidak efektif).

- 2) Faktor hubungan organisasi, hubungan organisasi dapat mempengaruhi tingkat efektivitas suatu program, jika hubungan sesama organisasi terjalin secara baik, contoh dalam hal berkomunikasi maka akan menciptakan efektivitas dalam program itu sendiri dan sebaliknya.
- 3) Sumber daya organisasi yang baik untuk implementasi program, semakin baik sumber daya dari organisasi tersebut maka semakin besar juga tingkat eektivitas dari suatu program tersebut, dikarenakan sumber daya yang baik dapat menghasilkan kinerja yang baik juga.
- 4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, semakin baik karakteristi dan kemampuan dari agen pelaksana maka dapat menghasilkan suatu kineja yang baik untuk tercapinya efektivitas dari program tersebut.

#### Indikator Efektivitas

Menurut Campbell J.P, (1970) dalam (Zainudin, 2014), Mengatakan bahwa secara umum pengukuran efektivitas meliputi:

- 1) Keberhasilan Program
- 2) Keberhasilan Sararan
- 3) Kepuasan Terhadap Program
- 4) Tingkat Input dan Output
- 5) Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Budiani (2007:53) dalam (Khadafi & Mutiarin, 2014) bahwa efektifitas suatu program dapat diukur dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

- 1) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana tingkat keberhasilan suatu program berdasarkan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya
- 2) Sosialisasi program, yaitu bagaimana kemampuan untuk melaksanakan dan memberikan sosialisasi program dan informasi program, agar dapat terlaksananya program yang sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya
- 3) Tujuan program, yaitu untuk mengukur sejauh mana tingkat kesesuaian program dengan sasaran dari program yang telah ditentukan sebelumnya
- 4) Pemantauan program, yaitu berupa evaluasi dari program yang telah dijalankan sebelumnya.

## 2. Transparansi

### a. Pengertian Transparansi

Menurut (Arifin Tkhir, 2015) mengatakan transparansi secara harfiah artinya jelas, atau juga dapat diartikan bisa dilihat secara menyeluruh. Dengan demikian transparansi adalah pelaksanaan suatu proses kegiatan yang dimana dalam proses kegiatan tersebut dapat dilihat secara menyeluruh. Transparansi juga merupakan salah satu proses untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan adanya transparansi dapat menumbuhkan sikap keadilan dalam setiap pengambilan kebijakan atau keputusan di lingkungan suatu organisasi pemerintah.

Dengan demikian transparansi adalah pemeberian informasi secara terbuka yang dilakukan pemerintah terkait aktivitas kegiatan pemerintahan dalam pengeolaan sumber daya publik kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan. Yang dimana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan atau menyampaikan informasi terkait informasi pengelolaan keuangan dan informasi lainnya, yang dimana hasil dari informasi tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik ole pihak yang berkepentingan.

Menurut Mardiasmo (2003:30) dalam (Arifin Tkhir, 2015) mengatakan bawah transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemeritah dalam membuat suatu kebijakan keuangan daerah sehingga kebijakan tersebut dapat diketahui dan juga dapat diawasi olehh anggota DPRD dan masyakarat. Selanjutnya menurut Tjokromidjoyo (2003:123) dalam (Arifin Tkhir, 2015) menjelakan bahwa transparansi adalah suatu kegiatan yang dapat di ketahui oleh banyak orang atau pihak yang dianggap berkepentingan dalam perumusan suatu kebijakan pemerintah, politik, organisasi atau badan usaha, yang dimana hal ini merupakan karakteristik dari *good governance* terkait transparansi yang mengakatakan bahwa suatu kegiatan manajemen pemerintah tidak boleh tertutup.

Menurut Hidayat (2007:23) dalam (Arifin Tkhir, 2015) Transparansi berarti masyarakat harus memperoleh informasi secara terbuka dan juga bebas dan bisa mendaptkan informasi secara mudah terkait kebijakan yang sudah di ambil. Dikutip dari *Good Gevernance* (Nugroho, Randi R.W 2004:128) dalam (Arifin Tkhir, 2015)

mengatakan transparansi adalah segala keputusan dan penerapan yang diambil dan dilaksanakan berdasarkan koridor hukum dan juga peraturan yang berlaku, yang berisi tentang informasi terkait kegiatan pengelolaan keuangan pemerintah yang dapat diakses secara cuma-cuma.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Transparansi adalah salah satu karakteristik guna menciptakan pemerintahan yang *good governance*, dan juga merupakan suatu kegiatan pemerintahan dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan anggaran dan pengelolaan anggaran yang dimana hasil dari kegiatan tersebut pemerintah wajib memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat secara luas tanpa adanya yang ditutupi.

#### b. Prinsip-prinsip Transparansi

Menurut (Mustopa Didjaja, 2003) dalam (Gunawan, 2016), prinsip-prinsip dari transparansi tidak hanya menyangkut mengenai keuangan, tetapi transparansi juga menyangkut perencanaan pemerintah mengenai :

- 1) Keterbukaan bagi masyarakat yang ingin ikut memberikan pendapatnya
- 2) Keterbukaan informasi dokumen agar dapat diketahui dan dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat
- 3) Dalam prosedur penyusunan rencana adanya keterbukaan dalam prosedur pengambilan kebijakan atau keputusan
- 4) Terdapat keterbukaan mengenai dokumen catatan sipil, buku tanah dan lain-lain

5) Keterbukaan terhadap peran masyarakat

Menurut (Kristianten, 2006)(Gunawan, 2016) bahwa transparansi anggaran meliputi hak setiap masyarakat agar dapat memperoleh informasi perencanaan anggaran yang meliputi hak:

- 1) Untuk dapat mengetahui
- 2) Menghadiri dan mengamati pertemuan publik
- 3) Mengemukakan pendapat
- 4) Memperoleh dokumen publik
- 5) Untuk dapat diberi informasi

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip dari transparansi dapat menciptakan tingkat kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah terkait pemberian informasi pengelolaan anggaran yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat.

c. Indikator Transparansi

Menurut (Kristianten, 2006) ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi yaitu :

- 1) Tersedianya aksesibilitas Informasi dokumen
- 2) Informasi yang lengkap dan jelas
- 3) Proses yang terbuka
- 4) Transparansi yang terjamin melalui kerangka regulasi

Berdasarkan penjelasan terkait Indikator Transparansi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Indikator dari Transparansi yaitu:

- 1) Adanya aksesibilitas Informasi yang lengkap dan jelas, mulai dari perencanaa, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban terkait program yang dijalankan
  - 2) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
  - 3) Keterbukaan dalam proses pengelolaan
  - 4) Keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa
3. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

a. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan yang di kembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan juga tata kelola dalam pengelolaan keuangan desa dan menghasilkan laporan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. aplikasi ini mulai dikembangkan sejak tahun 2015 dan mulai diterapkan di desa sejak tahun 2016. Dalam penggunaannya aplikasi Siskeudes ini dapat menghasilkan output berupa laporan-laporan dan dokumen tentang hasil dari pengelolaan keuangan desa yang dibuat sesuai dengan peraturan yang ada ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)). Adapun laporan-laporan atau dokumen yang dihasilkan dari penggunaan aplikasi Siskeudes ini adalah:

b. Dokumen Penatausahaan

- c. Bukti Penerimaan
- d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- e. Surat Setoran Pajak (SSP)
- f. Dan dokumen-dokumen lainnya
- g. Laporan-laporan
- h. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana)
- i. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register

Adapun kelebihan dari penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES ) adalah sebagai berikut :

- 1) Menghasilkan laporan-laporan atau dokumen hasil dari pengelolaan keuang desa yang sesuai dengan peraturan undang-undang
- 2) Proses tata kelola keuangan desa menjadi lebih mudah
- 3) Penggunaan aplikasi yang mudah dipahami
- 4) Terdapat Sistem Pengendalian Intern (Built-in Internal Control)
- 5) Adanya petunjuk atau pedomandalam pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi.

### 1.7. Kerangka Pemikiran

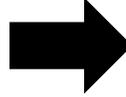
Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu :

#### Kerangka Pemikiran

Efektivitas Aplikasi Siskeudes :

- a) Menghasilkan Laporan-laporan atau Dokumen yang sesuai dengan kerangka regulasi
- b) Proses tata kelola Keuangan Desa menjadi lebih mudah

Transparansi  
Pengelolaan  
Keuangan  
Desa



**Gambar 1.1.** Kerangka Pemikiran

*Sumber : Peneliti 2018*

**1.8. Definisi Konseptual**

Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan bentuk pencapaian sesuatu kegiatan yang dimana dalam kegiatan itu dapat menghasilkan sesuatu yang berguna dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Efektivitas juga merupakan pencapaian suatu kegiatan dengan tepat dan benar yang sesuai dengan ketentuan dan juga berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Transparansi

Transparansi adalah salah satu karakteristik guna menciptakan pemerintahan yang *good governance*, dan juga merupakan suatu kegiatan pemerintahan dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan anggaran dan pengelolaan anggaran yang dimana hasil dari kegiatan tersebut pemerintah wajib memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat secara luas tanpa adanya yang ditutupi.

### 3. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Keuangan Desa (Siskeudes) adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan juga tata kelola dalam pengelolaan keuangan desa dan dapat menghasilkan laporan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **1.9. Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

##### 1. Indikator Efektivitas yaitu :

- 1) Keberhasilan Program
- 2) Keberhasilan Sararan
- 3) Kepuasan Terhadap Program
- 4) Input dan Output

##### 2. Indikator Transparansi

- 1) Tersedianya aksesibilitas Informasi dokumen
- 2) Informasi yang lengkap dan jelas
- 3) Proses yang terbuka
- 4) Transparansi yang terjamin melalui kerangka regulasi

#### **1.10. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu metode penelitian

kualitatif mengenai Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rantau Jaya 2017, berdasarkan pengertiannya menurut Merriam (1998) dalam (Yusuf, 2014), menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dapat menemukan sesuatu cara dan dapat memahami suatu fenomena, dengan melalui suatu prespekif atau proses dan melalui pandangan orang yang terlibat didalamnya.

Metode penelitian kualitatif dirasakan sangat tepat untuk penelitian ini, dikarenakan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mencari hasil menggunakan pendekatan dengan mencari makna, pengertian, pemahaman, kejadian, fenomena, dan orang yang terlibat maupun tidak terlibat yang diteliti secara menyeluruh dan kontekstual. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diambil dalam penelitian ini adalah Kantor Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Lokasi penelitian ini diambil untuk mempermudah peneliti dalam pencarian data, selain itu juga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini ialah pemerintah desa.

### 3. Unit Analisis

Menurut Moleong (2004:97) Unit analisis data adalah fokus atau komponen yang akan diteliti peneliti untuk mendapatkan data, unit analisis data juga berupa satuan tertentu untuk yang dapat diperhitungkan sebagai subjek dan objek dari suatu penelitian. Unit analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang validitas dan reabilitas, maka unit analisis dalam penelitian ini yaitu :

- a) Unit analisis data subjek terdiri dari, Kepala Desa, Bendahara Desa, Operator Aplikasi Siskeudes dan Masyarakat Desa Rantau Jaya.

**Tabel 1.4**  
Unit Analisis Data Subjek

No	Instansi yang Terkait	Narasumber	Jumlah
1	Pemerintah Desa Rantau Jaya	Kepala Desa	1
		Bendahara Desa	1
		Operator Aplikasi Siskeudes	1
2	Masyarakat	Masyakakat Desa Rantau Jaya	2
Jumlah			5

- b) Unit analisis data objek, Di Kantor Desa Rantau Jaya, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.



**Gambar 1. 2** Kantor Balai Desa Rantau Jaya

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Wawancara, dan Dokumentasi

##### a. Wawancara

Menurut (Yusuf, 2014) wawancara adalah suatu bentuk interaksi yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber guna untuk mendapatkan informasi yang ingin diketahui. Wawancara juga dapat diartikan sebagai proses tatap muka antar pewawancara dan narasumber sebagai pemberi informasi untuk mendapatkan data dan informasi terkait objek yang sedang diteliti. Wawancara dapat dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu, wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara yang dimana pewawancara sudah menyiapkan secara terperinci terkait daftar pertanyaan yang akan ditanyakan selama proses wawancara yang disusun dengan format yang tepat. Wawancara tidak terstruktur merupakan jenis wawancara yang dilakukan tidak menyusun daftar

pertanyaan terlebih dahulu dan tidak menggunakan format yang baku. Wawancara bebas yaitu jenis wawancara yang berlangsung secara alami dengan tidak menggunakan suatu pedoman atau format yang baku.

Dalam wawancara yang akan dilakukan peneliti nanti yaitu ingin mengetahui bagaimana Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Trasparansi Pengelolaan Keuangan Desa Rantau Jaya pada tahun 2017, yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa (Hermanto), Kepala Keuangan Desa (Haidir), Operator Aplikasi Siskeudes (Nur Fadly) dan Masyarakat Desa Rantau Jaya (Beroni dan Andi).

**Tabel 1. 5**

Daftar Wawancara

No	Instansi yang Terkait	Narasumber	Nama	Jumlah
1	Pemerintah Desa Rantau Jaya	Kepala Desa	Hermanto	1
		Kepala Keuangan Desa	Haidir	1
		Operator Aplikasi Siskeudes	Nur Fadly	1
2	Masyarakat	Masyakakat Desa Rantau Jaya	Beroni dan Andi	2
Jumlah				5

b. Dokumentasi

Menurut (Yusuf, 2014) dokumentasi adalah suatu jenis penelitian yang

mengumpulkan informasi melalui sebuah catatan atau karya seseorang yang sudah berlaku, yang dimana dalam dokumen tersebut dapat berupa tulisan teks, gambar, maupun foto, dokumen juga berupa sejarah, cerita, karya tulis, dan biografi. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

**Tabel 1. 6**

Data Dokumentasi

<b>Nama Data</b>	<b>Data Dokumentasi</b>
Profil Desa Rantau Jaya	Dokumentasi
RKPDes Tahun 2017	Dokumentasi
RPJMDESTahun 2017-2022	Dokumentasi
APBDES Tahun 2017	Dokumentasi
Susunan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2017	Dokumentasi
Laporan-Laporan Keuangan Desa Tahun 2017	Dokumentasi

## 5. Jenis Data

### a. Data Primer

Menurut (Hasan, 2002) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dilapangan yang diperoleh oleh peneliti secara langsung, adapun data primer yang dibutuhkan peneliti untuk bisa mendapatkan data secara langsung yaitu.

**Tabel 1.7**

Data Primer

<b>Nama Data</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>
Penyusunan Rencana Prioritas	Kepala Desa Masyarakat	Wawancara
Pelaksanaan Program Prioritas	Kepala Desa Dan Masyarakat	Wawancara
Keterbukaan Proses Pelaksanaan Program	Kepala Desa dan Masyarakat	Wawancara
Program Yang Berhasil Dicapai Dan Sesuai Sasaran	Kepala Desa	Wawancara
Sarana Dan Prasarana yang Dibutuhkan Dari Aplikasi Siskeudes	Kepala Desa	Wawancara
Kemudahan Dan Hambatan Dari Penggunaan Aplikasi Siskeudes	Operator Aplikasi Siskeudes	Wawancara
Tahap Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa	Bendahara Desa	Wawancara
Aksebilitas Informasi Program	Kepala Desa dan Masyarakat	Wawancara
Tersedianya Informasi Yang Lengkap Dan Jelas	Masyarakat	Wawancara
Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Yang Dijalankan Oleh Pemerintah Desa	Masyarakat	Wawancara
Pencapaian Tujuan Secara Menyeluruh	Kepala Desa	Wawancara
Transparansi Yang Terjamin Melalui Kerangka Regulasi	Kepala Desa	Wawancara

b. Data Skunder

Menurut (Hasan, 2002) data skunder adalah data data yang dapat diperoleh oleh peneliti melalui data yang sudah ada atau dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, adapun data primer dalam penelitian ini yang dibutuhkan peneliti untuk mendapatkan informasi yaitu :

**Tabel 1.8**

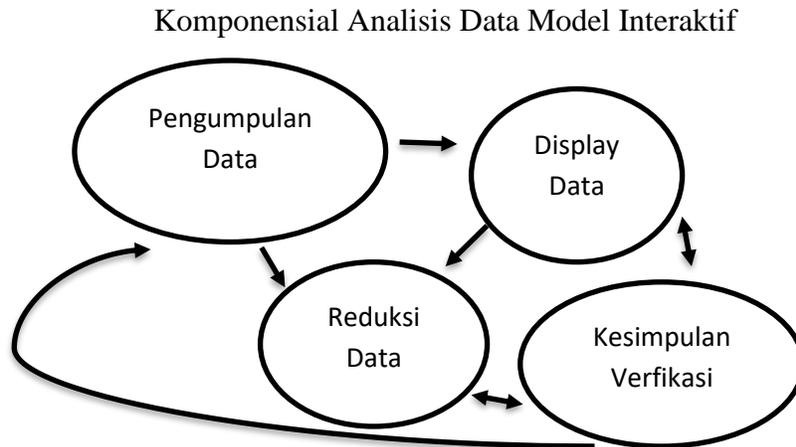
Data Skunder

<b>Nama Data</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>
Profil Desa Rantau Jaya	Dokumentasi
RKPDes Tahun 2017	Dokumentasi
RPJMDESTahun 2017-2022	Dokumentasi
APBDES Tahun 2017	Dokumentasi
Susunan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2017	Dokumentasi
Laporan-Laporan Keuangan Desa Tahun 2017	Dokumentasi

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dilakukan adalah teknik analisis data kualitatif yang dimana dalam pengertiannya menurut Fossey, cs., (2002:728) dalam (Yusuf, 2014) bahwa teknik analisis data dalam penelitian kaulitatif adalah sebuah proses pengumpulan data dengan mereiew dan memeriksa data yang sudah terkumpul kemudian menerangkan atau menjelaskan fenomena dan situasi yang ada. Menurut Miles dan Huberman dalam (Yusuf, 2014) menegaskan bawah pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat berbeda-beda seperti : obserasi, interview, dokumen,

kutipan, catatan-catatan melalui tape yang lebih banyak berupa tulisan atau kata-kata dibandingkan angka. Miles dan Huberman menawarkan pola umum dalam teknik analisis data melalui Model Interaktif sebagai berikut :



**Gambar 1. 3** Komponensial Analisis Data Model Interaktif

*Sumber: Yusuf 2014 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.*

Lebih jauh Miles dan Huberman (1984:21-23) dalam (Yusuf, 2014) mengatakan ada 3 (tiga) kegiatan untuk Analisis data yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah teknik analisis data yang menjunjuk kepada proses pemilihan, penyerderhanaan, pemokusan, pemisahan dan pentranspormasian data mentah yang ada dalam catatan dilapangan, adapun Reduksi data dalam penelitian ini yaitu dimana peneliti mencari datainformasi terkait Efektivitas Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Rantau Jaya Pada Tahun 2017, yang di dapat melalui wawancara yang akan dilakukan dengan Kepala

Desa, Sekretaris Desa, Kepala Keuangan Desa, Bendahara Desa, Operator Sistem Keuangan Desa, Dan Masyarakat Desa Rantau Jaya. Dimana apabila data yang didapat sesuai dengan pertanyaan yang diajukan maka data tersebut akan digunakan menjadi bahan untuk analisis, namun apabila data yang di dapat tidak sesuai yang pertanyaan yang diberikan maka data tersebut akan menjadi bahan perbandingan atau triangulasi data.

#### b. Data Display

Data display adalah teknik analisis data yang mengumpulkan informasi yang sebelumnya telah tersusun yang dapat membolehkan untuk pengambilan kesimpulan dan tindakan. Bentuk display data yang biasa di temui dalam penelitian kualitatif adalah berupa, teks naratif, kejadian atau peristiwa yang terjadi dimasa lampau. Adapun Data Display dalam penelitian ini yaitu data-data yang terkait data Primer atau data Skunder yang berkaitan dengan informasi untuk mengetahui Efektivitas Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Rantau Jaya Pada Tahun 2017. Dari data Primer dan Skunder tersebut nanti akan dijadikan sebagai Reduksi Data digunakan sebagai bahan untuk analisis terkait Efektivitas Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Rantau Jaya Pada Tahun 2017.

#### c. Kesimpulan/Verifikasi

Dalam teknik analisis data kesimpulan/verifikasi adalah proses penarikan kesimpulan dari semua data-data yang sudah didapatkan oleh peneliti yang telah dicatat

dan memberi makna mengenai sesuatu yang telah dilihat atau yang sudah di wawancarainya dan kemudian di verifikasi untuk menyesuaikan data yang didapat agar data tersebut dapat lebih tepat, komprehensif, dan objektif. Kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini dilakukan setelah membandingkan data terkait obojek yang diteliti yang dikelompokan berdasarkan tinggi rendahnya jawaban dari narasumber (Reduksi Data) kemudian di analisi dengan menggabungkan data yang didapat dari sumber lain (Data Display) agar hasil dari penelitian dapat menjadi lebih relevan.